

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKJiP)
Tahun 2023



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA SURAKARTA

TAHUN 2023



SURAKARTA

2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2024 ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023. Disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2024 ini, berdasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif dengan harapan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan di tahun selanjutnya. Sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Surakarta, 09 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA



KRISTIANA HARIYANTI, A.Pi., M.Si., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19741225 199803 2 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
A Gambaran Umum Organisasi.....	1
B Fungsi Strategis Perangkat Daerah.....	3
C Permasalahan Utama yang Dihadapi Perangkat Daerah.....	4
Bab II Perencanaan Kinerja.....	6
A Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	6
B Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2023.....	8
C Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	28
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	31
A Capaian Kinerja Organisasi.....	31
B Realisasi Anggaran.....	71
C Pencapaian Lainnya.....	80
Bab IV Penutup.....	82
A Kesimpulan.....	82
B Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan.....	82

DAFTAR TABEL

3.1	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yang Aman, Tangguh, Berkelanjutan.....	32
3.2	Predikat Capaian Kinerja.....	37
3.3	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dibandingkan Tahun – Tahun Sebelumnya.....	38
3.4	Perolehan Nilai Indeks IKA, IKU dan IKL Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023.....	40
3.5	Indeks Pencemaran Kualitas Air Sungai Kota Surakarta.....	42
3.6	Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Surakarta Tahun 2023.....	52
3.7	Luasan Tutupan Lahan Hijau Kota Surakarta.....	56
3.8	Luas Wilayah Yang Digunakan Untuk Perhitungan IKL Oleh KLHK Berdasarkan Perhitungan Badan Informasi Geospasial RI.....	56
3.9	Daftar Anggaran Yang Mengalami Rasionalisasi Tahun 2023.....	62

DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.....	2
3.1	Grafik Capaian Indikator IKA per Triwulan.....	34
3.2	Grafik Capaian Indikator IKU per Triwulan.....	34
3.3	Grafik Capaian Indikator IKL per Triwulan.....	34
3.4	Grafik Capaian Indikator PMPRB per Triwulan.....	35
3.5	Grafik Capaian Indikator IKA Tahun 2023.....	39
3.6	Grafik Capaian Indikator IKU Tahun 2023.....	39
3.7	Grafik Capaian Indikator IKL Tahun 2023.....	39
3.8	Perbandingan Perolehan Nilai Indeks IKA, IKU dan IKL Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023.....	40
3.9	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kualitas Air (IKA) di Kota Surakarta.....	47
3.10	Grafik perbandingan realisasi kinerja Indikator Kualitas Udara (IKU) di Kota Surakarta.....	53
3.11	Grafik perbandingan realisasi kinerja Indikator Kualitas Lahan (IKL) di Kota Surakarta.....	57
3.12	Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2023.....	64
3.13	IPAL Ekoriparian di Taman Sekartaji.....	65
3.14	Penanaman Pohon Bersama di Area TPA Putri Cempo.....	66
3.15	Pemantauan Kualitas Udara Ambien Metoda Passive Sampler Pada Area Pemukiman Dan Perkantoran.....	66
3.16	Alat AQMS (Automatic Quality Monitoring System) Pemantauan Kualitas Udara Otomatis Yang Berada di Kantor Dinas Lingkungan Hidup.....	67
3.17	Pengembangan Program Kampung Iklim.....	67
3.18	Penanaman Pohon di Urban Forest.....	68
3.19	Penerimaan Penghargaan Nirwasita Tantra dalam kategori Entitas Pemerintahan kategori Kota Sedang Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022.....	81
3.20	Penerimaan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2023 dari Kementerian LHK.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

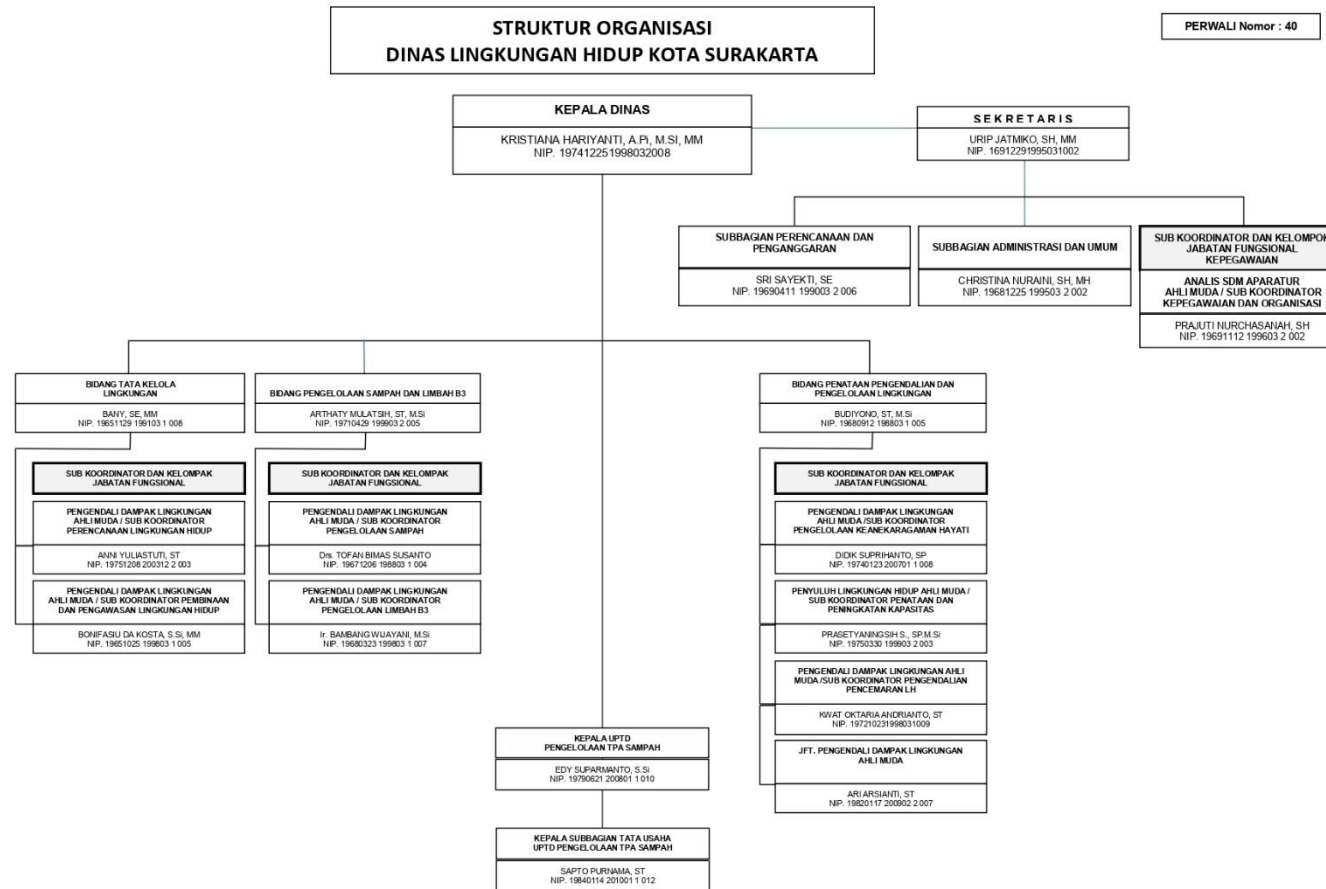
Dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Sesuai Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Administrasi dan Umum dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
 3. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi
- c. Bidang Tata Kelola Lingkungan
 1. Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan Hidup
 2. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 1. Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
 2. Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3
- e. Bidang Penataan Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan
 1. Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 2. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
 3. Sub Koordinator Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
- f. UPT Pengelolaan TPA Sampah
 1. Kepala UPTD Pengelolaan TPA Sampah
 2. Kepala Subbagian Pengelolaan TPA Sampah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi DLH Kota Surakarta seperti pada Gambar 1-1 sebagai berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta



B. Fungsi Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan terkait perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat,

- penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
 5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta disusun dengan memperhatikan aspek kajian, capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal.

Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta adalah:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Sulitnya memberikan edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Bertambahnya volume timbulan sampah;
4. Belum optimalnya kualitas ruang terbuka hijau;
5. Masih rendahnya capaian indeks kualitas air;
6. Meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas udara;
7. Masih rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan;
8. Peningkatan emisi gas rumah kaca dan belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
9. Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan aparatur pemerintah daerah;

10. Belum optimalnya pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
11. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup;
12. Belum optimalnya kualitas dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Masih kurangnya sarana prasarana, sumberdaya dan manajemen pengelolaan persampahan dan kebersihan;
15. Belum optimalnya pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan, dan kurangnya sarana prasarana pengolahan Limbah B3;
16. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dan fasilitas pendukung kesehatan dan keselamatan kerja;
17. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan dinas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2022.

Dalam mewujudkan misi ke 3 Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yaitu tentang mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$ <p>Perhitungan IKU operasional dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghitung rata-rata masing-masing parameter NO₂ dan SO₂ tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap). Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO₂ dan SO₂ tahunan dengan cara menghitung rata - rata parameter NO₂ dan SO₂ pada empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran). Menghitung indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN

	2. Indeks Kualitas Air	$IP = \frac{\sqrt{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}}{2}$ <p>Keterangan:</p> <p>IP = indeks pencemaran</p> <p>C_i = konsentrasi parameter kualitas air i</p> <p>L_{ij} = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j</p> <p>IKA dihitung berdasarkan nilai IP yang dihasilkan dari perhitungan masing-masing titik sampling di masing-masing sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika IP berada pada rentang 0-1 - tercemar ringan jika IP berada pada rentang 1-5 - tercemar sedang jika IP berada pada rentang 5-10 - tercemar sedang jika IP berada pada rentang 5-10
	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ <p>Ket:</p> <p>IKL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>LTL = Luas Tutupan Lahan</p> <p>LW = Luas Wilayah</p> <p>DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal</p> <p>Seluruh hamparan daratan yang ditutupi pohon-pohon berdasarkan hasil analisis tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah kota.</p>

2. Indikator dan target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perubahan Renstra DLH Tahun 2021-2026.

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023
1. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks kualitas air (IKA)	indeks	52,8
	Indeks kualitas udara (IKU)	indeks	81,79
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	indeks	24,34
2. Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	skor	18,33

B. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA

Tahun: 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh dan berkelanjutan	Indeks kualitas air (IKA)	52,8
	Indeks kualitas udara (IKU)	81,79
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	24,34

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Satuan
1.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup	50	persen
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	Tersedianya dokumen pendukung	Jumlah dokumen instrumen	3	dokumen

Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	perencanaan lingkungan yang mendukung RPPLH		
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota yang Disusun	1	dokumen
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Dokumen Telaah Kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	3	dokumen
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota		jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	0	dokumen
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen kajian lingkungan	Jumlah dokumen kajian lingkungan yang tersusun	2	dokumen
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersedianya dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/	2	dokumen

		Kota yang disusun	Kota yang Disusun		
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	0	dokumen
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	0	dokumen
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkendalinya pencemaran air dan udara serta kerusakan lingkungan hidup	Cakupan pemantauan kualitas air sungai	100	persen
			Cakupan pemantauan kualitas udara	100	persen
			Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	53,70	persen
			Presentase luas tutupan bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam	0,07	persen
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemantauan kualitas air, udara dan adaptasi perubahan lingkungan	Cakupan pemantauan kualitas air sungai	100	persen
			Cakupan pemantauan kualitas udara	100	persen
			Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	53,70	persen
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan	Terpantaunya kualitas lingkungan hidup terhadap	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan	3	dokumen

	Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	media tanah, air, udara, dan laut	Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatnya Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	dokumen
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0	dokumen
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sumur resapan dangkal dan dalam yang terbangun	Jumlah sumur resapan dangkal dan dalam yang terbangun	36	unit
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	2	dokumen
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya persentase RTH yang dikelola dengan baik	Presentase RTH dalam kondisi baik	76,14	persen
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah RTH yang dikelola dengan baik	Jumlah RTH dikelola dengan baik	134	lokasi

	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pengelolaan RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	136,16	Ha
4.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai ketentuan	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	55	persen
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlayaninya permohonan rekomendasi ijin tempat penyimpanan sementara limbah B3	Persentase permohonan rincian teknis penyimpanan dan standar penyimpanan limbah B3 yang terlayani	100	persen
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terawasi dan terbinanya penanggungjawab usaha pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	60	laporan
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlayaninya rekomendasi teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	25	dokumen

			Terintegrasi Secara Elektronik		
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya usaha/ kegiatan Pengelolaan Depo yang sesuai ketentuan	Jumlah permohonan persetujuan teknis kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota,	1	unit
			Jumlah depo pengumpulan limbah B3 skala kota yang memenuhi ketentuan	1	unit
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terawasi dan terbinanya penanggungjawab usaha depo pengumpul dalam pengelolaan Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terawasinya pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan / atau penimbunan limbah B3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi	1	dokumen

			Kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		
	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota		jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	0	usaha
	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota		jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	0	unit
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota		jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	unit
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	59,09	Persen

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	59,09	Persen
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Tersedianya rekomendasi dan/ atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12	Dokumen
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	24	Laporan
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan	0	Dokumen

			Operasi yang Diberikan		
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0	Badan Usaha
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Persentase sekolah adiwiyata dan Persentase anggota saka kalpataru memiliki SKK	Persentase anggota saka kalpataru memiliki SKK (Syarat Kecakapan Khusus)	17.33	Persen
			Persentase sekolah adiwiyata	3.54	Persen
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	19	Kelompok
			Persentase sekolah adiwiyata tingkat provinsi	0,88	Persen
		Persentase sekolah adiwiyata tingkat nasional	0,59	Persen	

			Presentase pendampingan calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi		Persen
			presentase pendampingan calon sekolah adiwiyata tingkat nasional		Persen
			presentase pendampingan calon sekolah adiwiyata tingkat mandiri		Persen
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan	6	Dokumen
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Keompok Masyarakat/Pe laku Usaha/Kegiatan yang terlibat		Orang
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		Lembaga
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Tokoh / lembaga	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat	9	orang/ lembaga

	HIDUP UNTUK MASYARAKAT	masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional		
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	9	orang/ lembaga
			Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional		Entitas
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya keterlibatan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH	Jumlah Masyarakat/Le mbaga Masyarakat/Du nia Usaha/Dunia Pendidikan/Fil antropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	45	Entitas
8.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya cakupan penanganan sampah dan	Persentase cakupan area pelayanan kebersihan	88.00	Persen

		pelayanan kebersihan	Persentase sampah tertangani	88.00	Persen
	Pengelolaan Sampah	Meningkatnya cakupan penanganan sampah	Persentase sampah tertangani	88.00	Persen
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang Disusun dan Ditetapkan	3	Dokumen
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	109500	Ton
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	135	Kel
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	10	Unit

			Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0	Dokumen
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	0	Ton
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah	0	Kelompok

			Berbasis Masyarakat		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0	Unit
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	0	Ton
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Tersedianya evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan sampah	Jumlah evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama	2	Laporan
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	2	Laporan

9	Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	18,33	Skor
			Nilai Maturitas Kelembagaan	0	Skor
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Skor nilai SAKIP perangkat daerah	71	Skor
			Nilai Maturitas Kelembagaan	39	Skor
			Nilai SPIP	2.01	Angka
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83.25	Skor
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan monitoring	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan monitoring	100	Persen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3	Laporan

			Realisasi Kinerja SKPD		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan	100	Persen
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230	orang/ bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	700663 9000	Rupiah
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib	0	Dokumen

			Retribusi Daerah		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pegawai perangkat daerah	Persentase kecukupan sarana pegawai perangkat daerah	100	Persen
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya dokumen proses bisnis, SOP, Evaluasi SOP dan SKM	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	7	Dokumen
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai mendapatkan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	200	Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kecukupan administrasi perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100	Persen
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15	Dokumen

			yang Disediakan		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan percetakan dinas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	Laporan
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan media elektronik DLH	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen
	Pengadaan Kendaraan Dinas		Jumlah Unit Kendaraan	4	Unit

Operasional atau Lapangan		Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	Unit
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan listrik dan air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Su	12	Laporan

			mber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase cakupan barang milik daerah terpelihara	100	Persen
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150	Unit
	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	90	Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	160	Unit

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA

No.	Sasaran Strategis / OPD / Program	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Setelah
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,8 indeks	52,8 indeks
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	81,79 indeks	81,79 indeks
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	24,34 indeks	24,34 indeks
2.	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,8 indeks	52,8 indeks
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	81,79 indeks	81,79 indeks
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	24,34 indeks	24,34 indeks
3.	Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	18,33 skor	18,33 skor

No.	Program	Anggaran (Rp)		Ket.
		Sebelum	Setelah	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.539.017.199,00	29.022.437.786,00	APBD P

2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.152.500.000,00	1.103.540.000,00	APBD P
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	784.833.000,00	494.329.000,00	APBD P
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	11.382.161.850,00	7.101.361.850,00	APBD P
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	141.646.570,00	72.347.000,00	APBD P
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	217.560.000,00	84.956.332,00	APBD P
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	281.000.000,00	178.657.000,00	APBD P
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	168.000.000,05	70.239.800,00	APBD P
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	48.800.000,00	48.800.000,00	APBD P
10.	Program Pengelolaan Persampahan	12.541.950.000,00	14.486.656.750,00	APBD P
Total		56.257.468.619,00	52.663.325.518,00	

No.			Target
------------	--	--	---------------

	Sasaran Strategis / OPD / Program	Indikator Kinerja	Sebelum	Setelah
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,8 indeks	52,8 indeks
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	81,79 indeks	81,79 indeks
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	24,34 indeks	24,34 indeks
2.	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,8 indeks	52,8 indeks
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	81,79 indeks	81,79 indeks
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	24,34 indeks	24,34 indeks
3.	Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	18,33 skor	18,33 skor

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang pada Perubahan Renstra tahun 2021-2026.

Pengukuran Capaian Kinerja pada tahun 2023 dilakukan dengan cara:

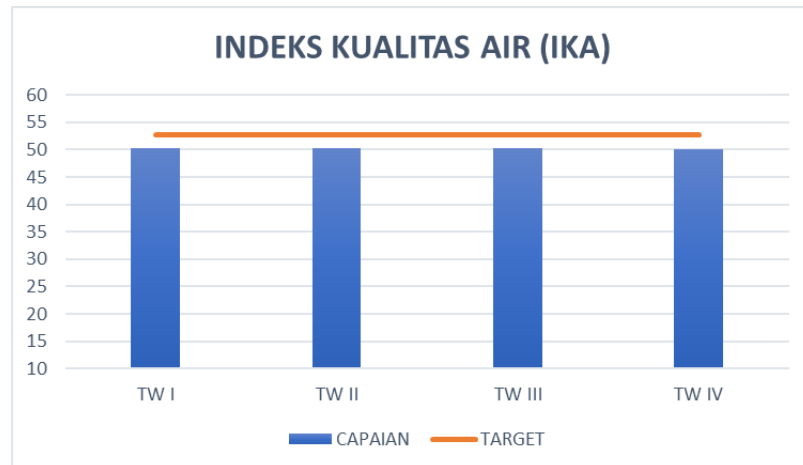
1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yang Aman, Tangguh, Berkelanjutan

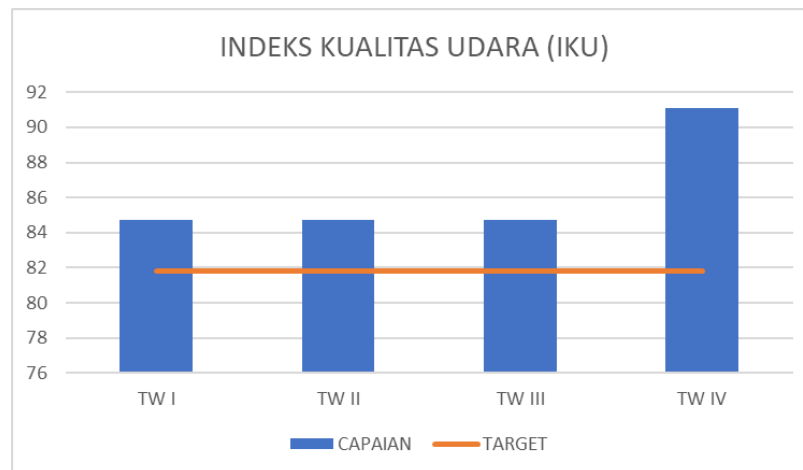
No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Target TW 1	Target TW 2	Target TW 3	Target TW 4	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
								Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh dan berkelanjutan																			
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	50,30	95,27	Sangat berhasil	50,30	95,27	Sangat berhasil	50,30	95,27	Sangat berhasil	50	94,7	Sangat berhasil
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	81,79	81,79	81,79	81,79	81,79	84,74	103,61	Sangat berhasil	84,74	103,61	Sangat berhasil	84,74	103,61	Sangat berhasil	91,08	111,36	Sangat berhasil
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	30,83	126,66	Sangat berhasil	30,83	126,66	Sangat berhasil	30,83	126,66	Sangat berhasil	31,78	130,57	Sangat berhasil
Rata-Rata Capaian									108,61			108,61			108,61			108,20	
Sasaran OPD 1. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan																			
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	50,30	95,27	Sangat berhasil	50,30	95,27	Sangat berhasil	50,30	95,27	Sangat berhasil	50	94,7	Sangat berhasil
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	81,79	81,79	81,79	81,79	81,79	84,74	103,61	Sangat berhasil	84,74	103,61	Sangat berhasil	84,74	103,61	Sangat berhasil	91,08	111,36	Sangat berhasil
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	30,83	126,66	Sangat berhasil	30,83	126,66	Sangat berhasil	30,83	126,66	Sangat berhasil	31,78	130,57	Sangat berhasil
Sasaran OPD 2. Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien																			

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Target TW 1	Target TW 2	Target TW 3	Target TW 4	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
								Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Skor	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	Sangat berhasil	18,33	18,33	Sangat berhasil	18,33	18,33	Sangat berhasil	18,33	18,33	Sangat berhasil

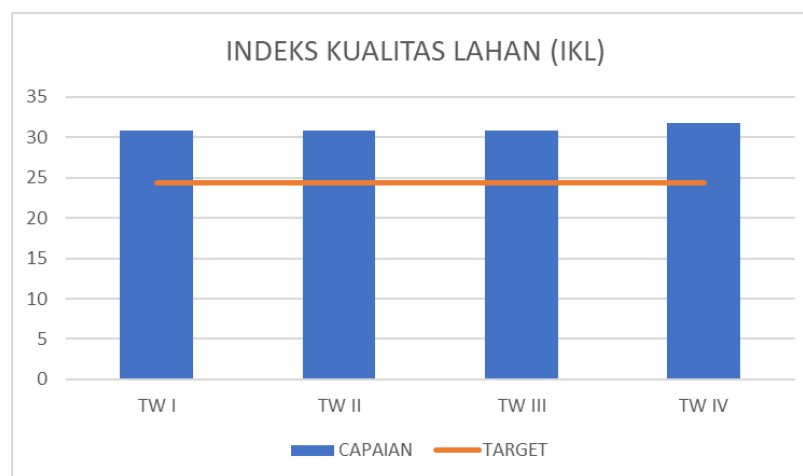
Gambar 3.1. Grafik Capaian Indikator IKA per Triwulan



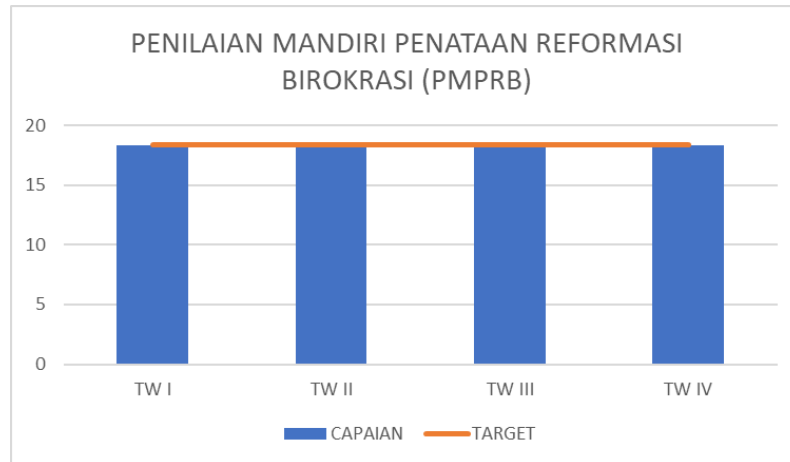
Gambar 3.2. Grafik Capaian Indikator IKU per Triwulan



Gambar 3.3. Grafik Capaian Indikator IKL per Triwulan



Gambar 3.4 Grafik Capaian Indikator PMPRB per Triwulan



2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun – tahun sebelumnya.

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,60	50 ,98	52,70	50 ,30	52,80	50
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	81,59	83,06	81,69	84,74	81,79	91,08
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	24,34	30,22	24,34	30,83	24,34	31,78
4.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Skor	-	-	18,23	18,33	18,33	18,33

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja menggunakan pengukuran skala ordinal dengan klasifikasi sebagai berikut:

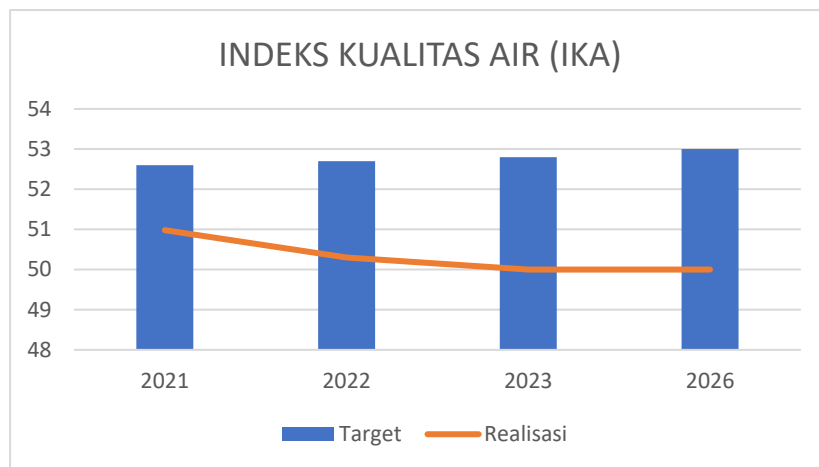
Tabel 3.2. Predikat Capaian Kinerja

Predikat	Nilai	Mean
Sangat berhasil	$N > 85$	92,5
Berhasil	$70 < n \leq 85$	77,5
Cukup berhasil	$55 < n \leq 70$	62,5
Tidak berhasil	$N < 55$	27,5

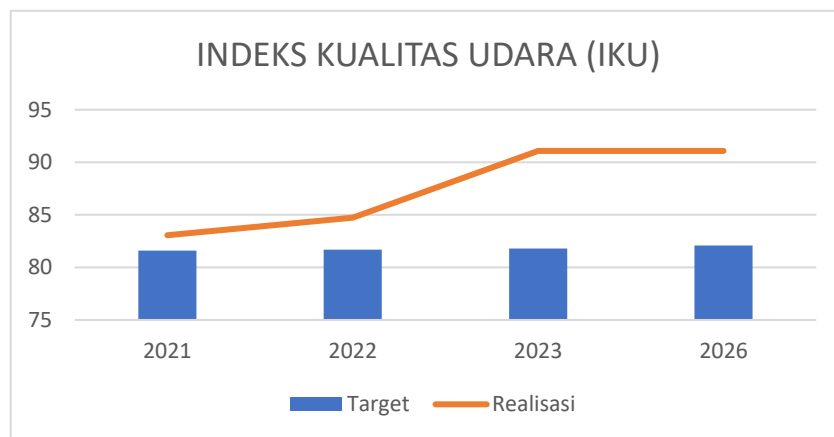
Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh dan berkelanjutan														
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,60	50 ,98	96,92	52,70	50 ,30	95,45	52,80	50	94,70	53,10	94,73	Sangat berhasil
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	81,59	83,06	101,80	81,69	84,74	103,73	81,79	91,08	111,34	82,09	103,23	Sangat berhasil
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	24,34	30,22	124,16	24,34	30,83	126,66	24,34	31,78	130,56	24,34	126,66	Sangat berhasil
Rata-Rata Capaian					107,6			108,61			112,2		108,20	Sangat berhasil
Sasaran OPD 1. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan														
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,60	50 ,98	96,92	52,70	50 ,30	95,45	52,80	50	94,70	53,10	94,73	Sangat berhasil
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	81,59	83,06	101,80	81,69	84,74	103,73	81,79	91,08	111,34	82,09	103,23	Sangat berhasil
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	24,34	30,22	124,16	24,34	30,83	126,66	24,34	31,78	130,56	24,34	126,66	Sangat berhasil
Sasaran OPD 2. Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien														
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Skor	-	-	-	18,23	18,33	100,55	18,33	18,33	100,0	18,63	98,39	Sangat berhasil

Gambar 3.5. Grafik Capaian Indikator IKA Tahun 2023



Gambar 3.6. Grafik Capaian Indikator IKU Tahun 2023



Gambar 3.7. Grafik Capaian Indikator IKL Tahun 2023

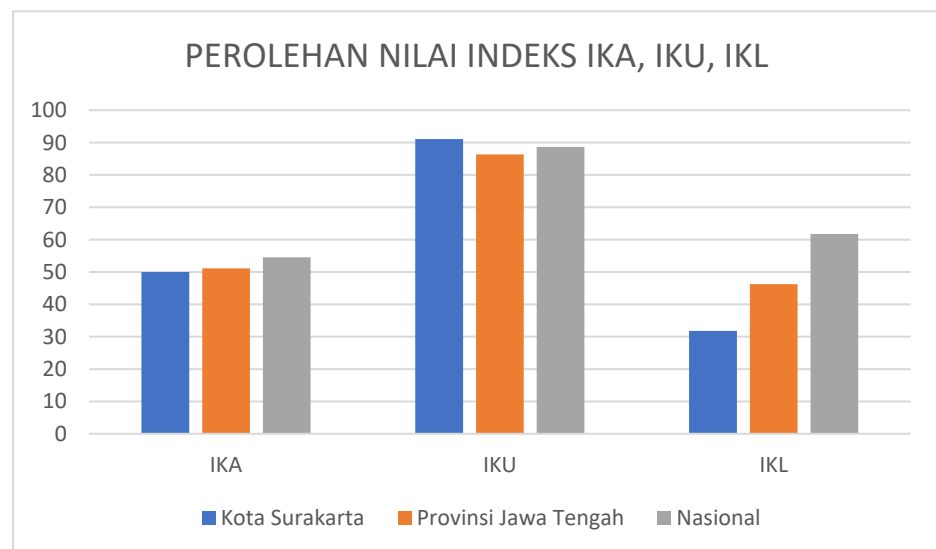


4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Membandingkan perolehan Nilai IKA, IKU dan IKL Kota dengan perolehan Nilai IKA, IKU dan IKL Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 3.4. Perolehan Nilai Indeks IKA, IKU dan IKL Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Nilai Indeks	Kota Surakarta	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
IKA	50,00	51,14	54,55
IKU	91,08	86,34	88,65
IKL	31,78	46,22	61,75

Gambar 3.8. Perbandingan Perolehan Nilai Indeks IKA, IKU dan IKL Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Dari tabel capaian diatas dapat disajikan analisa sebagai berikut:

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

- a. Perbandingan Target dan capaian kinerja tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dan Target Jangka Menengah RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Tahapan perhitungan IKA adalah sebagai berikut:

- a) melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air Badan Air yang merepresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/Kota
- b) melakukan perhitungan status mutu air seluruh lokasi pemantauan pada setiap parameter. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) menentukan status mutu masing-masing lokasi
- d) menghitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemaran ringan, cemaran sedang dan cemaran berat) untuk setiap data pemantauan seluruh lokasi
- e) menghitung persentase jumlah masing-masing status mutu terhadap jumlah total untuk masing-masing wilayah
- f) mentransformasikan nilai Indeks Pencemar (IP) ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase status mutu
- g) pembobotan indeks diberikan batasan sebagai berikut:
 - memenuhi baku mutu = 70
 - tercemar ringan = 50
 - tercemar sedang = 30
 - tercemar berat = 10
- h) nilai IKA Provinsi atau Kabupaten/Kota diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian persentase setiap status mutu dengan bobotnya

Untuk mengetahui kondisi kualitas air Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pemantauan kualitas air sungai yang mengalir di Kota Surakarta sebanyak 51 titik sampel yang diambil secara periodik dan 5 titik sampel yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Titik pengambilan sampel meliputi Sungai Bengawan Solo, Sungai Pepe, Sungai Gajah Putih, Sungai Kalianyar, Sungai Premulung dan sungai Brojo pada bagian hulu, tengah dan hilir.

Dari hasil pemantauan kualitas air sungai tersebut diperoleh nilai indeks pencemaran sebagai berikut:

Tabel 3.5. Indeks Pencemaran Kualitas Air Sungai Kota Surakarta

No	Lokasi Pemantauan (Pengambilan Sampel Air Sungai)	Pelaksana	Waktu pemantauan	Nilai IP (Indeks Pencemar)	Status Mutu Air*
1	Sungai Gajah Putih Hulu 3372-GPK Karangasem, Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan	DLH Surakarta	10 Januari 2023	2,82	Cemar Ringan
2	Sungai Gajah Putih Tengah 3372-GPP Jembatan Jl. Pakel, Kerten, Kec. Laweyan	DLH Surakarta	10 Januari 2023	3,47	Cemar Ringan
3	Sungai Gajah Putih Hilir 3372-GPS Jembatan Jln,Kahuripan Timur, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari,	DLH Surakarta	10 Januari 2023	2,56	Cemar Ringan
4	Sungai Kalianyar Hulu 3372-KAN Jembatan Jln,Kapten Piere Tendean, Kel, Nusukan, Kec, Banjarsari, Kota Surakarta	DLH Surakarta	10 Januari 2023	1,73	Cemar Ringan
5	Sungai Kalianyar Tengah 3372-KAE Jln,Tentara Pelajar, Kel, Jebres, Kec, Jebres	DLH Surakarta	10 Januari 2023	1,75	Cemar Ringan
6	Sungai Kalianyar Hilir 3372-GPJ Ngoresan, Kel, Jebres-Kec, Jebres	DLH Surakarta	10 Januari 2023	1,65	Cemar Ringan
7	Sungai Pepe Atas Hulu 3372-PPK Komplang, Kel, Kadipiro- Kec, Banjarsari	DLH Surakarta	10 Januari 2023	1,65	Cemar Ringan
8	Sungai Pepe Atas Hilir 3372-PPN Jln,Popda, Kel, Nusukan, Kec, Banjarsari	DLH Surakarta	10 Januari 2023	2,16	Cemar Ringan
9	Sungai Bengawan Solo Kelurahan Semanggi Kec Pasar Kliwon	DLH Surakarta	10 Januari 2023	3,50	Cemar Ringan
10	Sungai Premulu Hulu 3372-PMK Kleco, Kel, Pajang - Kec, Laweyan	DLH Surakarta	11 Januari 2023	1,97	Cemar Ringan
11	Sungai Premulu Tengah 3372-PMT Tipes, Kel, Tipes-Kec,Serengan	DLH Surakarta	11 Januari 2023	2,82	Cemar Ringan
12	Sungai Premulu Hilir 3372-PMM Mojo, Kel, Mojo- Kec, Pasar Kliwon	DLH Surakarta	11 Januari 2023	3,11	Cemar Ringan
13	Sungai Brojo Hulu	DLH Surakarta	11 Januari 2023	2,85	Cemar Ringan

	3372-BJP Pajang, Kelurahan Pajang , Kecamatan Laweyan				
14	Sungai Brojo Tengah 3372-BJG Jembatan JI, Gondosuli Selatan, Kel, Pajag, Kec, Laweyan	DLH Surakarta	11 Januari 2023	3,49	Cemar Ringan
15	Sungai Brojo Hilir 3372-BJT Jembatan JI, Kelengkeng, Kel, Pajang, Kec, Laweyan	DLH Surakarta	11 Januari 2023	3,48	Cemar Ringan
16	Sungai Pepe Bawah Hulu 3372-PPG JI, Garuda III, Kel, Gilingan, Kec, Banjarsari	DLH Surakarta	10 Januari 2023	4,24	Cemar Ringan
17	Sungai Pepe Bawah Hilir 3372-PPS Kampung Sewu, Kel, Sewu- Kec, Jebres	DLH Surakarta	10 Januari 2023	3,90	Cemar Ringan
18	Sungai Gajah Putih Hulu 3372-GPK Karangasem, Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan	DLH Surakarta	19 Juni 2023	2,77	Cemar Ringan
19	Sungai Gajah Putih Tengah 3372-GPP Jembatan Jl. Pakel, Kerten, Kec. Laweyan	DLH Surakarta	19 Juni 2024	3,75	Cemar Ringan
20	Sungai Gajah Putih Hilir 3372-GPS Jembatan Jln,Kahuripan Timur, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari,	DLH Surakarta	19 Juni 2025	3,61	Cemar Ringan
21	Sungai Kalianyar Hulu 3372-KAN Jembatan Jln,Kapten Piere Tendean, Kel, Nusukan, Kec, Banjarsari, Kota Surakarta	DLH Surakarta	19 Juni 2026	1,61	Cemar Ringan
22	Sungai Kalianyar Tengah 3372-KAE Jln,Tentara Pelajar, Kel, Jebres, Kec, Jebres	DLH Surakarta	19 Juni 2027	2,14	Cemar Ringan
23	Sungai Kalianyar Hilir 3372-GPJ Ngoresan, Kel, Jebres-Kec, Jebres	DLH Surakarta	19 Juni 2028	2,23	Cemar Ringan
24	Sungai Pepe Atas Hulu 3372-PPK Komplang, Kel, Kadipiro- Kec, Banjarsari	DLH Surakarta	19 Juni 2029	1,53	Cemar Ringan
25	Sungai Pepe Atas Hilir 3372-PPN Jln,Popda, Kel, Nusukan, Kec, Banjarsari	DLH Surakarta	19 Juni 2030	1,71	Cemar Ringan

26	Sungai Bengawan Solo Kelurahan Semanggi Kec Pasar Kliwon	DLH Surakarta	19 Juni 2031	2,33	Cemar Ringan
27	Sungai Premulu Hulu 3372-PMK Kleco, Kel, Pajang - Kec, Laweyan	DLH Surakarta	20 Juni 2032	3,56	Cemar Ringan
28	Sungai Premulu Tengah 3372-PMT Tipes, Kel, Tipes-Kec,Serengan	DLH Surakarta	20 Juni 2033	2,79	Cemar Ringan
29	Sungai Premulu Hilir 3372-PMM Mojo, Kel, Mojo- Kec, Pasar Kliwon	DLH Surakarta	20 Juni 2034	2,72	Cemar Ringan
30	Sungai Brojo Hulu 3372-BJP Pajang, Kelurahan Pajang , Kecamatan Laweyan	DLH Surakarta	20 Juni 2035	2,05	Cemar Ringan
31	Sungai Brojo Tengah 3372-BJG Jembatan Jl, Gondosuli Selatan, Kel, Pajag, Kec, Laweyan	DLH Surakarta	20 Juni 2036	2,26	Cemar Ringan
32	Sungai Brojo Hilir 3372-BJT Jembatan Jl, Kelengkeng, Kel, Pajang, Kec, Laweyan	DLH Surakarta	20 Juni 2037	2,46	Cemar Ringan
33	Sungai Pepe Bawah Hulu 3372-PPG Jl, Garuda III, Kel, Gilingan, Kec, Banjarsari	DLH Surakarta	19 Juni 2029	2,93	Cemar Ringan
34	Sungai Pepe Bawah Hilir 3372-PPS Kampung Sewu, Kel, Sewu- Kec, Jebres	DLH Surakarta	19 Juni 2030	2,12	Cemar Ringan
35	Sungai Gajah Putih Hulu 3372-GPK Karangasem, Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan	DLH Surakarta	18 Oktober 2023	2,78	Cemar Ringan
36	Sungai Gajah Putih Tengah 3372-GPP Jembatan Jl. Pakel, Kerten, Kec. Laweyan	DLH Surakarta	18 Oktober 2023	3,68	Cemar Ringan
37	Sungai Gajah Putih Hilir 3372-GPS Jembatan Jln,Kahuripan Timur, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari,	DLH Surakarta	18 Oktober 2023	3,22	Cemar Ringan
38	Sungai Kalianyar Hulu 3372-KAN Jembatan Jln,Kapten Piere Tendean, Kel, Nusukan, Kec, Banjarsari, Kota Surakarta	DLH Surakarta	18 Oktober 2023	4,06	Cemar Ringan
39	Sungai Kalianyar Tengah	DLH Surakarta	18 Oktober 2023	3,70	Cemar Ringan

	3372-KAE Jln,Tentara Pelajar, Kel, Jebres, Kec, Jebres				
40	Sungai Kalianyar Hilir 3372-GPJ Ngoresan, Kel, Jebres-Kec, Jebres	DLH Surakarta	18 Oktober 2023	2,85	Cemar Ringan
41	Sungai Pepe Atas Hulu 3372-PPK Komplang, Kel, Kadipiro- Kec, Banjarsari	DLH Surakarta	18 Oktober 2023	1,75	Cemar Ringan
42	Sungai Pepe Atas Hilir 3372-PPN Jln,Popda, Kel, Nusukan, Kec, Banjarsari	DLH Surakarta	18 Oktober 2023	3,07	Cemar Ringan
43	Sungai Bengawan Solo Kelurahan Semanggi Kec Pasar Kliwon	DLH Surakarta	18 Oktober 2023	2,51	Cemar Ringan
44	Sungai Premulu Hulu 3372-PMK Kleco, Kel, Pajang - Kec, Laweyan	DLH Surakarta	19 Oktober 2023	3,63	Cemar Ringan
45	Sungai Premulu Tengah 3372-PMT Tipes, Kel, Tipes-Kec,Serengan	DLH Surakarta	19 Oktober 2023	3,27	Cemar Ringan
46	Sungai Premulu Hilir 3372-PMM Mojo, Kel, Mojo- Kec, Pasar Kliwon	DLH Surakarta	19 Oktober 2023	3,40	Cemar Ringan
47	Sungai Brojo Hulu 3372-BJP Pajang, Kelurahan Pajang , Kecamatan Laweyan	DLH Surakarta	19 Oktober 2023	2,22	Cemar Ringan
48	Sungai Brojo Tengah 3372-BJG Jembatan Jl, Gondosuli Selatan, Kel, Pajag, Kec, Laweyan	DLH Surakarta	19 Oktober 2023	2,20	Cemar Ringan
49	Sungai Brojo Hilir 3372-BJT Jembatan Jl, Kelengkeng, Kel, Pajang, Kec, Laweyan	DLH Surakarta	19 Oktober 2023	2,73	Cemar Ringan
50	Sungai Pepe Bawah Hulu 3372-PPG Jl, Garuda III, Kel, Gilingan, Kec, Banjarsari	DLH Surakarta	18 Oktober 2023	2,14	Cemar Ringan
51	Sungai Pepe Bawah Hilir 3372-PPS Kampung Sewu, Kel, Sewu- Kec, Jebres	DLH Surakarta	18 Oktober 2023	3,25	Cemar Ringan
52	A1-JT-72-002 BENGAWAN SOLO- STASIUN ONLIMO Jebres Kota Surakarta	KLHK	29 Mei 2023	1,67	Cemar Ringan
53	A1-JT-72-012 BENGAWAN SOLO- Kelurahan Semanggi, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta	KLHK	29 Mei 2023	2,70	Cemar Ringan
54	A1-JT-72-002 BENGAWAN SOLO-	KLHK	5 Agustus 2023	1,55	Cemar Ringan

	STASIUN ONLIMO Jebres Kota Surakarta				
55	A1-JT-72-012 BENGAWAN SOLO- Kelurahan Semanggi, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta	KLHK	5 Agustus 2023	2,62	Cemar Ringan
56	A1-JT-72-002 BENGAWAN SOLO- STASIUN ONLIMO Jebres Kota Surakarta	KLHK	02 November 2023	1,63	Cemar Ringan
57	A1-JT-72-012 BENGAWAN SOLO- Kelurahan Semanggi, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta	KLHK	03 November 2023	1,25	Cemar Ringan

Kualitas air Sungai dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil uji laboratorium dengan baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya untuk Kelas 2. Status mutu air merupakan tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Indeks Pencemaran (Pollution Index) digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Indeks Pencemaran ditentukan untuk suatu peruntukan, kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian badan air atau sebagian dari suatu sungai. Kemudian dari hasil perhitungan indeks pencemaran kualitas air sungai diatas dilakukan rerata sehingga mendapatkan nilai indeks kualitas air.

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	0	0%	70	0
Ringan	54	100%	50	50
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Jumlah Sampel	54			

NILAI
IKA
TAHUN
LALU:
50,30

TARGET
IKA

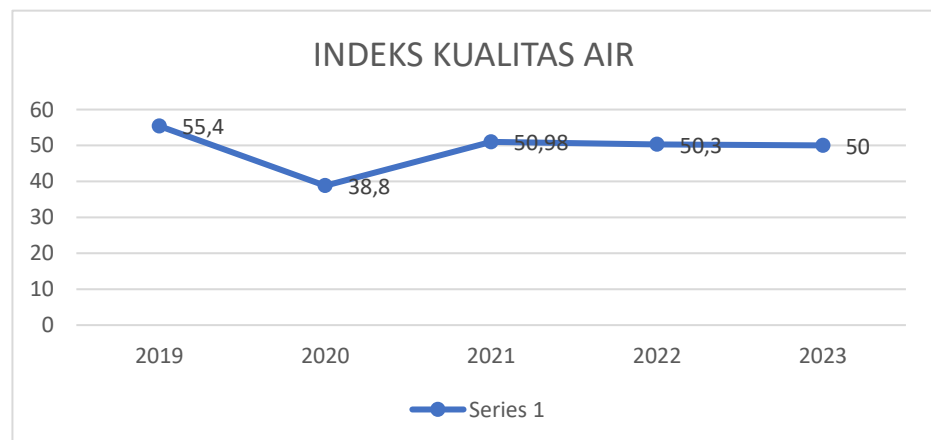
Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) :	50,00	TAHUN 2023: 52,80
Status IKA 2023	Sedang	

Kategori Penentuan Status Mutu Air

Nomor	Nilai Indeks Pencemar (IP _j)	Status Mutu Air
1	$0 \leq IP_j \leq 1,0$	Baik (memenuhi baku mutu)
2	$1,0 \leq IP_j \leq 5,0$	Cemar ringan
3	$5,0 \leq IP_j \leq 10,0$	Cemar sedang
4	$IP_j \leq 10,0$	Cemar berat

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Surakarta dan verifikasi yang dilaksanakan oleh DLHK Prov Jawa Tengah dan KLHK tahun 2023, diketahui bahwa Nilai IKA pada hasil analisa dan evaluasi yaitu 50,00 dalam kategori Sedang dengan target nilai IKA tahun 2023 adalah 52,80.

Grafik kualitas air beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Gambar 3.9. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kualitas Air (IKA) di Kota Surakarta

- b. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Secara umum semua sungai di Kota Surakarta adalah tercemar Ringan. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, parameter yang

melebihi baku mutu adalah BOD dan Total Phosphat. Tingginya nilai BOD bisa diindikasikan terdapat pencemaran bahan organik dan Nilai Total Phosphat tinggi bisa mengindikasikan masih banyaknya limbah dari kegiatan mencuci menggunakan detergen yang masuk ke sungai sehingga menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Tertundanya pembangunan IPAL Komunal Tahu/Tempe yang masuk dalam project Green Infrastrukture Initiative (GII-GIZ) menyebabkan perbaikan kualitas air sungai Kalianyar tidak dapat diraih sesuai target yang diharapkan. Pembangunan IPAL Ekoriparian di Jebres masih belum mampu maksimal menahan peningkatan polutan yang masuk ke sungai Kalianyar. Bila pembangunan IPAL Ekoriparian mampu diduplikasi di tempat yang lain akan sangat berdampak mengurangi beban polutan yang masuk ke sungai. Diharapkan pembangunan IPAL Ekoriparian tidak hanya disungai Kalianyar, tetapi di sungai-sungai lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas air sungai di Kota Surakarta. Selain itu berdasarkan hasil perhitungan nilai indeks pencemar, bagian hulu sungai yang terdapat di Kota Surakarta sudah tercemar ringan. Bagian hulu pada beberapa sungai yang mengalir ke Kota Surakarta dimana kewenangannya berada pada kabupaten lain masih banyak ditemukan peternakan Babi yang membuang kotorannya secara langsung ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, disamping itu banyak kegiatan UKM batik dan pewarnaan kain yang membuang limbah cair dari proses produksi secara langsung ke Sungai. Sehingga hal tersebut juga berdampak terhadap belum tercapainya target nilai IKA tahun 2023 (52,08), karena salah satu upaya untuk menaikkan nilai IKA adalah semua parameter harus memenuhi baku mutu air kelas 2 Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021.

Rekomendasi untuk peningkatan kualitas air di Kota Surakarta antara lain:

- Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;
- Meningkatkan penyediaan sarana dan parsarana pengelolaan air limbah domestic dan usaha skala kecil khususnya untuk Masyarakat;

- Meningkatkan pengawasan internal pengelolaan IPAL kegiatan industri, Fasilitas pelayanan Kesehatan, perhotelan;
- Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah domestic dan usaha skala kecil;
- Meningkatkan peran pelayanan IPAL domestic;
- Meningkatkan pembinaan terhadap usaha skala kecil;
- Meningkatkan peran serta Masyarakat, usaha dan atau kegiatan serta lembaga dalam program pengendalian pencemaran air atau usaha peningkatan kualitas air;
- Koordinasi lintas sectoral dengan kabupaten lain terkait pengendalian pencemaran air;
- Dilibatkannya Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengawasan pelaksanaan ijin berusaha oleh DPMPTSP;
- Komitmen positif pelaku usaha dalam menaati kewajiban pemenuhan ijin berusaha dalam hal pengendalian pencemaran air.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

- a. Perbandingan Target dan capaian kinerja tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dan Target Jangka Menengah RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Surakarta tahun 2023, diketahui bahwa IKU Kota Surakarta Tahun 2023 mengalami kenaikan nilai dari 84,66 pada 2022 menjadi 91,08.

Perhitungan IKU Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida (NO_2), dan Sulfur Dioksida (SO_2) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran
- b) melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) untuk masing-masing kabupaten/kota sehingga menghasilkan nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota
- c) melakukan perbandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) provinsi atau nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) kabupaten/kota dengan baku mutu udara ambien Referensi EU untuk mendapatkan Indeks Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Indeks Sulfur Dioksida (SO_2). Rata-rata Indeks Nitrogen Dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2) menghasilkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara IKU

Nilai Indeks Kualitas Udara diperoleh dari hasil pemantauan kualitas udara ambien yang mewakili kondisi pemukiman, perkantoran, transportasi (road side) dan industri dengan parameter pemantauan yaitu NO_2 (Nitrogen Dioksida) dan SO_2 (Sulfur Dioksida). Pelaksanaan pemantauan kualitas udara dilaksanakan menggunakan anggaran APBD Pemerintah Kota

Surakarta dan anggaran pusat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Berikut hasil pemantauan kualitas udara ambien di beberapa tempat di Kota Surakarta:

Tabel 3.6. Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Surakarta Tahun 2023

Peruntukan Wilayah Sampling	Kab/Kota	No	Lokasi Sampling	TAHAP I		TAHAP II	
				Kadar NO ₃	Kadar SO ₃	Kadar NO ₃	Kadar SO ₃
PEMUKIMAN	DLH	1	Perumahan Gayam Sari, Kel. Sumber	8,506	1,670	7,922	4,171
	DLH	2	Lapangan Sriwaru, Kel. Sondakan	8,447	5,373	8,512	6,552
	DLH	3	Taman Jaya Wijaya, Kel. Mojosongo	11,425	3,139	14,704	6,460
	DLH	4	Lapangan Losari, Kel. Semanggi	7,165	1,388	7,823	5,524
	DLH	5	Lapangan Kartopuran, Kel. Jayengan	9,029	3,281	10,729	5,344
	KLHK	6	Perumahan Gayam Sari, Kel. Sumber	22,160	7,190	10,310	5,25
Nilai Rata-rata per wilayah Peruntukan				11,122	3,674	10,000	5,610
PERKANTORAN	DLH	1	Kompleks Balaikota Surakarta, Kel. Kampung baru	8,047	2,406	9,804	3,784
	DLH	2	Kompleks DPRD Kota Surakarta, Jl, Adi Sucipto, Kel. Jajar	8,786	2,165	8,545	5,383
	DLH	3	Kantor Kecamatan Jebres, Kel. Jebres	9,681	1,504	9,910	3,683
	DLH	4	Kantor Kelurahan Serengan	7,662	3,155		
	DLH	5	Kantor DLH Kota Surakarta, Kel. Manahan	9,972	2,757	10,487	3,840
	KLHK	6	Kompleks Balaikota Surakarta, Kel. Kampung baru	18,060	6,030	15,200	7,140
Nilai Rata-rata per wilayah Peruntukan				10,368	3,003	10,789	4,766
TRANSPORTASI	DLH	1	Jl. Adi Sucipto (Depan Plaza Manahan), Kel. Manahan	9,985	8,835		
	DLH	2	Jl. Kol. Sutarto (samping ASIA Motor), Kel. Jebres	9,181	1,736	8,881	4,631
	DLH	3	Jl. Dr. Radjiman (Pasar Klewer), Kel. Gajahan	8,112	2,703	8,319	4,274
	DLH	4	Jl. Veteran Tipes Serengan, Kel. Tipes	9,652	1,500	8,424	5,882
	DLH	5	Jl. Slamet Riyadi (Samping OJK), Kel. Penumping	7,939	3,115	7,811	3,948
	KLHK	6	Jl. Adi Sucipto (Depan Plaza Manahan), Kel. Manahan	23,76	13,4	19,36	12,92
	KLHK	7	AQMS KLHK-KOTA SURAKARTA			38,4	26,68
Nilai Rata-rata per wilayah Peruntukan				11,438	5,215	15,199	9,723
INDUSTRI	DLH	1	Perumahan Fajar Indah, Gg. Nanas, Kel. Jajar	8,104	2,045	11,111	3,645
	DLH	2	Lapangan Panahan Jagalan, Kel. Jagalan, Jebres	9,133	1,465	9,313	4,395
	DLH	3	Jl. Sungai Riam Kiri, Kel. Kedunglumbu	8,083	2,003	9,153	3,629
	DLH	4	Sekip RT 4/XXIII, Kadipiro, Kel. Kadipiro	8,040	1,663	8,617	3,798
	DLH	5	Kampung Tipes, Kel. Tipes	8,726	2,575	8,769	4,095
	KLHK	6	Perumahan Fajar Indah, Gg. Nanas, Kel. Jajar	12,650	10,620	14,000	5,340
Nilai Rata-rata per wilayah Peruntukan				9,123	3,395	10,161	4,150

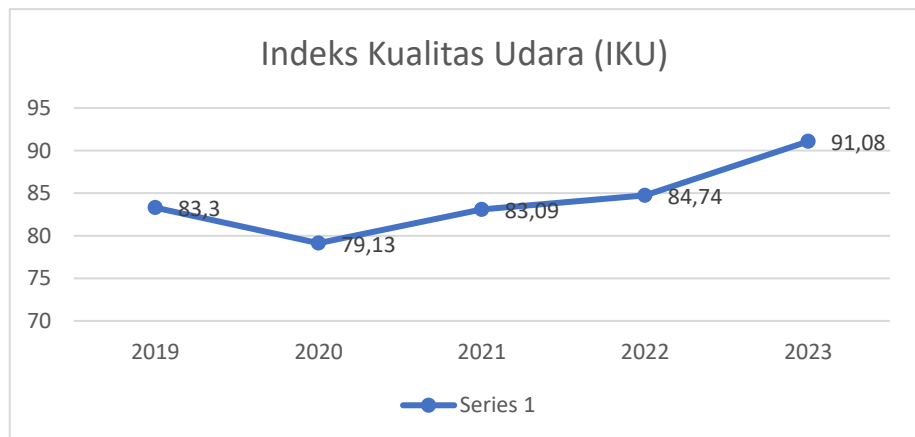
Kemudian dari data hasil pemantauan kualitas udara ambien diatas dapat dihitung rerata kandungan NO₂ dan SO₂ selanjutnya dihitung indeks kualitas udaranya.

Rerata SO ₂	Rerata NO ₂	Index SO ₂	Index NO ₂	Ieu	NILAI IKU
4,91	11,02	0,25	0,28	0,26	91,08
STATUS IKU:				SANGAT BAIK**	

NILAI IKU TAHUN 2022
84,74

TARGET IKU DALAM RENSTRA
81,79

Selain itu realisasi Indeks Kualitas Udara pada tahun 2023 telah memenuhi target jangka menengah RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.



Gambar 3.10. Grafik perbandingan realisasi kinerja Indikator Kualitas Udara (IKU) di Kota Surakarta

Dari tahun 2019 nilai IKU mengalami penurunan pada tahun 2020 kemudian secara bertahap mengalami kenaikan sampai tahun 2023 menjadi 91,08.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Kualitas udara merujuk pada kondisi atau sifat-sifat udara di suatu wilayah pada waktu tertentu. Hal ini mencakup komposisi kimia udara, konsentrasi polutan udara, serta kondisi fisik seperti suhu,

kelembapan, dan tekanan udara. Evaluasi kualitas udara melibatkan pengukuran berbagai parameter untuk menilai sejauh mana udara tersebut bersih, aman, dan sesuai untuk dihirup oleh manusia serta mendukung kehidupan lingkungan. Kualitas udara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah emisi gas buang dari berbagai sumber, termasuk kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil. Polutan udara seperti karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), ozon (O₃), dan partikulat (PM_{2.5} dan PM₁₀) adalah contoh polutan yang dapat memengaruhi kualitas udara.

Dari sisi sektor transportasi pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat masih menjadi tekanan dalam hal menjaga kualitas udara di Kota Surakarta. Fasilitas dan daya tarik wisata di Kota Surakarta menjadikan Kota Surakarta sebagai barometer bagi kota – kota disekitarnya yang mampu menarik pengunjung datang ke Kota Surakarta dengan menggunakan kendaraan bermotor. Penyediaan sarana transportasi umum di Kota Surakarta saat ini mampu mengimbangi tekanan pencemaran udara dari sektor transportasi. Selain itu, peningkatan upaya penghijauan di beberapa area di Kota Surakarta serta pembatasan permohonan penebangan pohon juga memberikan dampak positif terhadap upaya perbaikan kualitas udara di Kota Surakarta. Pada tahun 2023 DLH menggalakkan penanaman pohon sebagai bentuk penghijauan di Kota Surakarta. Nilai IKL yang mengalami peningkatan juga sejalan dengan perbaikan kualitas udara di Kota Surakarta.

Untuk mengimbangi tekanan pencemaran udara di Kota Surakarta, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam menjaga kualitas udara di Kota Surakarta antara lain :

- Pemantauan kualitas udara secara berkala secara manual di beberapa lokasi yang mewakili kawasan Pemukiman, Perkantoran, Industri dan *Roadside* serta secara otomatis menggunakan *Air Quality Monitoring System* (AQMS) sesuai dengan program dan anggaran yang direncanakan;
- Menggalakkan penanaman di RTH publik maupun privat;

- Pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menegakkan peraturan dibidang lingkungan hidup terutama pada sektor pencemaran udara;
- Penggalakan kegiatan Program Kampung Iklim di beberapa wilayah Kota Surakarta dengan penanaman pohon dipekarangan, menangani sampah dengan baik dan benar;
- Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan terkait imbauan penggunaan angkutan massal, imbauan penggunaan bahan bakar dengan kualitas baik;
- Komitmen positif pelaku usaha dalam menaati kewajiban pemenuhan ijin berusaha dalam hal pengendalian pencemaran udara.

3) INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)

- a. Perbandingan Target dan capaian kinerja tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan Kota Surakarta yang telah diverifikasi oleh KLHK, diperoleh nilai 31,78 (naik dari Tahun 2022 yang sebesar 30,83).

Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan luas dari:

- hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
- semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di Kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan Pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen), dikalikan 0,6 (nol koma enam).
- ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dikalikan 0,6 (nol koma enam).
- rehabilitasi hutan dan lahan, dikalikan 0,0 – 0,6 (nol koma nol sampai nol koma enam).

Penentuan kualitas indeks

No	Kategori	Angka Rentang
----	----------	---------------

1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Berikut data luasan tutupan lahan hijau Kota Surakarta:

Tabel 3.7. Luasan Tutupan Lahan Hijau Kota Surakarta

No.	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
A. RTH			
1	Hutan Kota	87.136	1.87
2	Median Jalan	53.818	1.15
3	Sabuk Hijau	21.430	0.46
4	Sempadan Sungai	89.360	1.91
5	Taman Kota	44.947	0.96
Jumlah		296.691	6.35
B. VEGETASI LAINNYA			
7	Pekarangan	492.509	10.54
8	Taman Lingkungan	5.764	0.12
Jumlah		498.273	10.67
Total		794.964	17.02

Luas Wilayah yang digunakan untuk perhitungan IKL oleh KLHK berdasarkan perhitungan Badan Informasi Geospasial RI adalah sebagai berikut:

Luas Wilayah *	Luas Hutan	Luas belukar dalam kawasan	luas belukar pada fungsi lindung	Kebun Raya (data LIPI)	RTH	Taman Kehati	Tutupan Vegetasi Lainnya	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4672	0	0	0	0	296,828	0	498,168	0

Tabel 3.8.

Luas Wilayah Yang Digunakan Untuk Perhitungan IKL Oleh KLHK Berdasarkan Perhitungan Badan Informasi Geospasial RI

Kemudian dari data – data tersebut dapat dihitung indeks kualitas lahan dengan rumus;

$$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$$

di mana

LTL = luas Tutupan Lahan

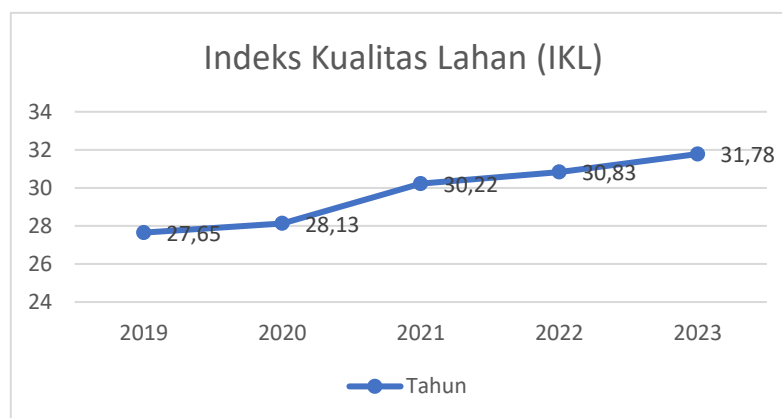
LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut

Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

DKK	TL	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN (IKTL)	INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)	IKL TAHUN 2022	TARGET IKL DALAM RENSTRA
9	10	11	12	30,83	24,34
0	0,10	31,78	31,78		
Status Indeks Kualitas Lahan (IKL)			Kurang		

Pada Tahun 2023 perolehan nilai IKTL telah memenuhi target jangka menengah RPJMD tahun 2021-2026 dan target Perubahan Renstra DLH Tahun 2021-2026 dengan capaian 31,78.



Gambar 3.11. Grafik perbandingan realisasi kinerja Indikator Kualitas Lahan (IKL) di Kota Surakarta

Dari tahun 2019 sampai tahun 2023 tren nilai IKL mengalami kenaikan.

Luas tutupan lahan dihitung dari hamparan yang ditutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Perhitungan nilai IKL berdasarkan digitasi luas tutupan lahan yang ditutupi vegetasi pada citra satelit Kota Surakarta. Kenaikan indeks ini disebabkan adanya upaya penghijauan di beberapa wilayah di Kota Surakarta, serta upaya dalam mempertahankan pohon untuk tidak dilakukan penebangan. Karena semakin luas tutupan vegetasi maka akan meningkatkan nilai IKL. Selain itu, peran Masyarakat secara massif dalam penghijauan lahan juga menambah kontribusi dari peningkatan nilai IKL, hasil meningkatnya nilai IKL selaras dengan meningkatnya nilai IKU, yang berarti penyerapan polutan udara oleh pepohonan berkontribusi secara signifikan.

Dinas Lingkungan Hidup berupaya menjaga dan meningkatkan luasan RTH dan nilai IKL melalui :

- Upaya mempertahankan pohon untuk tidak dilakukan penebangan;
- Penghijauan pada jalur hijau, taman-taman di Kota Surakarta. Peningkatan tutupan vegetasi dapat dilakukan lebih baik dengan penghijauan di aset pemkot yang tidak terpakai;
- Pemeliharaan tanaman yang telah ditanam di Jalur hijau dan taman-taman;
- Penegakan regulasi untuk penyediaan RTH di lahan privat dengan kewajiban mencantumkan penyediaan RTH dalam dokumen lingkungan (UKL - UPL/AMDAL);
- Pemberian edukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk peduli lingkungan salah satunya dengan melakukan penghijauan. DLH Kota Surakarta memiliki program sekolah adiwiyata yang mendorong sekolah-sekolah untuk melakukan penghijauan di area sekolah dan pemberian bibit kepada masyarakat pada event-event yang diselenggarakan DLH Kota Surakarta;
- Penghijauan pada lahan privat atau publik melalui kegiatan Pengembangan Kampung Iklim;
- Komitmen positif pelaku usaha dalam menaati kewajiban pemenuhan ijin berusaha dalam hal pemenuhan ruang terbuka hijau;

- Komitmen bidang untuk tetap melaksanakan tupoksi secara maksimal dalam hal pemeliharaan RTH dan penggalakan penanaman pohon di area area publik dan privat.

4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

- a. Penilaian PMPRB Tahun 2023 menggunakan nilai Tahun 2022
- b. Perbandingan Target dan capaian kinerja tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja pada tahun 2022 telah memenuhi target dan memenuhi target jangka menengah RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 dengan capaian nilai 18,33.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dengan didukung perencanaan yang berkualitas, sumberdaya manusia, pengukuran kinerja, monitoring kegiatan, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen dan Kemauan yang kuat, mulai dari pimpinan sampai dengan staf, kesamaan persepsi dan tujuan merupakan hal utama dalam pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (man, money, method). Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Surakarta menurun menjadi 50 dari 50,3 dari Tahun 2022. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan nilai Indeks IKA tersebut, baik dari kegiatan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pencapaian IKA atau kegiatan pendukung pencapaian nilai IKA.

Berikut kami sampaikan analisa terkait efisiensi penggunaan sumber daya:

- a. Dari sisi sumber daya manusia, personil yang menangani kegiatan pengampu IKA masih bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Pengambilan sampel kualitas air pada beberapa titik Sungai masih bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan cara membagi personal petugas sampling sehingga kebutuhan untuk mendapatkan data pendukung Indeks IKA dapat terepenuhi dengan baik. Yang dibutuhkan dari sisi sumber daya manusia adalah peningkatan kompetensi petugas pengambil sampel karena di DLH setiap tahun terjadi penyegaran personal pada bidang

– bidang sehingga personil yang baru belum mempunyai kompetensi atau pengalaman dalam hal pengambilan sampel uji kualitas air Sungai.

- b. Dari sisi anggaran, anggaran tahun 2023 mengalami refofusing anggaran dimana anggaran di Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebelum perubahan senilai Rp. 784.833.000,00 berubah menjadi Rp. 494.329.000,00.

Hal ini sangat berdampak terhadap perencanaan program dan kegiatan. Beberapa hal diantaranya adalah:

a) Kewajiban pengambilan sampel kualitas air Sungai yang seharusnya setiap Sungai diambil sampelnya pada bagian hulu, Tengah dan hilir, dikarenakan refofusing anggaran pengambilan sampel dilaksanakan pada bagian hulu dan hilir Sungai saja. Hal ini menjadikan keterbatasan data pemantauan atau monitoring karena kita tidak bisa memetakan secara maksimal usaha dan atau kegiatan mana saja yang menghasilkan air limbah berpotensi mencemari Sungai.

b) Kewajiban untuk mendorong wilayah untuk mengikuti kegiatan kampung proklam menjadi terhambat. Kampung Proklam yang sudah terbentuk tidak bisa dilakukan pembinaan dan pendampingan lagi oleh DLH sehingga berpotensi hal – hal terkait pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Kampung Proklam terbentuk menjadi berkurang semangat dan pelaksanaannya.

c. Dari sisi metode, pengambilan sampel kualitas air Sungai yang dilaksanakan menjadi kurang representative karena musim kemarau yang lebih Panjang dari musim penghujan. Ketentuan pengambilan sampel uji yang harus mewakili periode musim kemarau dan periode musim penghujan menjadi tidak terpenuhi dengan baik. Pengambilan sampel uji periode kedua pada bulan Oktober yang diharapkan mewakili musim penghujan belum sepenuhnya bisa dikatakan mewakili musim penghujan karena intensitas hujan yang turun di bulan Oktober masih rendah. Bila pengambilan sampel uji dilaksanakan menunggu intensitas musim penghujan tinggi maka DLH akan mengalami keterhambatan dalam hal pencapaian realisasi anggaran.

Tabel 3.9. Daftar Anggaran Yang Mengalami Rasionalisasi Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran			Tambah/(Kurang)
			Sebelum	Sesudah	Realisasi	
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan		784.833.000,00	494.329.000,00	488.455.270,00	290.504.000,00
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		436.244.000,00	375.674.000,00	370.611.270,00	60.570.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Uji kualitas udara, uji kualitas air	230.974.000,00	183.694.000,00	181.597.300,00	47.280.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Proklam	205.270.000,00	191.980.000,00	189.013.970,00	13.290.000,00
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		118.655.000,00	118.655.000,00	117.955.000,00	tetap
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Pembuatan sumur resapan	118.655.000,00	118.655.000,00	117,955,000,00	tetap

2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		11.382.161.850,00	7.101.361.850,00		4.280.800.000,00
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		11.382.161.850,00	7.101.361.850,00	7.090.245.108,00	4.280.800.000,00
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan RTH	11.382.161.850,00	7.101.361.850,00	7.090.245.108,00	4.280.800.000,00
	Total Anggaran Program		12.166.944.850,00	7.595.690.850,00		(-) 4.571.254.000,00

Kegiatan yang menunjang nilai IKU DLH melekat pada bidang P3L sehingga analisis efisiensi hanya di lihat dari Program, Kegiatan dan Sub Program pada bidang Penataan , Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan seperti dijabarkan diatas. Anggaran Program yang menunjang nilai IKU DLH mengalami rasionalisasi (penurunan anggaran) sebesar Rp. 4.571.254.000,00.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran Indeks Kualitas Air (IKA) antara lain:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup
- c. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan



Gambar 3.12. Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2023



Gambar 3.13. IPAL Ekoriparian di Taman Sekartaji

Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran Indeks Kualitas Udara (IKU) antara lain:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- c. Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
- d. Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- f. Program Keanekaragaman Hayati



Gambar 3.14. Penanaman Pohon Bersama di Area TPA Putri Cempo



Gambar 3.15. Pemantauan Kualitas Udara Ambien Metoda Passive Sampler Pada Area Pemukiman Dan Perkantoran



Gambar 3.16. Alat AQMS (Automatic Quality Monitoring System)
Pemantauan Kualitas Udara Otomatis Yang Berada di Kantor Dinas
Lingkungan Hidup

Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran Indeks Kualitas Lahan (IKL) antara lain:

- a. Program Keanekaragaman Hayati;
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.



Gambar 3.17. Pengembangan Program Kampung Iklim



Gambar 3.18. Penanaman Pohon di Urban Forest

Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) antara lain:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berbagai kegiatan penunjang indikator kinerja utama yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Pengetatan penilaian dokumen lingkungan (AMDAL/UKL UPL)
2. Pembuatan RPPLH dan Naskah Akademis RPPLH sebagai langkah awal untuk perencanaan pembuatan Perda RPPLH
3. Pembuatan dokumen Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kota Surakarta
4. Pembuatan dokumen IKPLHD Kota Surakarta
5. Pemantauan kualitas air sungai, IPAL komunal dan industri
6. Pemantauan kualitas udara ambien dengan metoda passive sampler dan AQMS
7. Sosialisasi Pengendalian pencemaran lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan di Kota Surakarta
8. Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan pendampingan dan menggalakkan pembentukan kampung Proklam baru sehingga Masyarakat terdorong untuk memiliki kesadaran dalam pembentukan Kampung Proklam
9. Penanganan secara cepat aduan masyarakat mengenai gangguan lingkungan
10. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
11. Peningkatan pengelolaan persampahan dan TPA
12. Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

13. Pendampingan dalam kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan metode 3 R
14. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah
15. Peningkatan luasan tutupan lahan melalui penghijauan, pembangunan dan revitalisasi taman kota dan mengendalikan permohonan penebangan pohon
16. Pemberian bibit tanaman kepada warga masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga penghijauan
17. Pemberian pelatihan dan pendampingan sekolah - sekolah untuk menjadi sekolah adiwiyata
18. Membentuk Saka Kalpataru yang anggotanya adalah sekolah - sekolah setingkat SMA agar peduli terhadap pengelolaan lingkungan
19. Pemberian penghargaan bagi kader lingkungan, sekolah adiwiyata tingkat kota dan proklam tingkat kota
20. Pengendalian pengelolaan Limbah B3 dengan pelaksanaan monitoring dan pengawasan serta sosialisasi pengelolaan Limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan
21. Pengembangan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
22. Penambahan IPAL ecoriparian di beberapa titik sungai di Kota Surakarta
23. Mendorong kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah cair rumah tangga melalui IPAL komunal
24. Mendorong dunia usaha untuk peduli melalui CSR dan mendorong pelaksanaan mengikuti kaidah-kaidah pelestarian LH

B. Realisasi Anggaran

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	29.539.017.199,00	29.022.437.786,00	28.795.285.596,00	91,50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.242.450,00	128.731.222,00	127.483.225,00	99,03
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	65.166.250,00	61.264.250,00	61.091.375,00	99,72
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5.666.400,00	5.666.400,00	5.475.000,00	96,62
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	67.409.800,00	61.800.572,00	60.916.850,00	98,57
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.370.610.175,00	18.591.073.460,00	18.229.978.602,00	98,06
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	19.368.710.175,00	18.589.173.460,00	18.228.078.602,00	98,06
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100
Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	229.440.000,00	208.870.400,00	206.451.667,00	98,84
<i>Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	229.440.000,00	208.870.400,00	206.451.667,00	98,84
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.716.000,00	143.654.000,00	143.603.000,00	99,96

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	100.000.000,00	98.475.000,00	98.475.000,00	100
<i>Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai</i>	54.716.000,00	45.179.000,00	45.128.000,00	99,96
Administrasi Umum Perangkat Daerah	691.278.000,00	733.372.300,00	721.171.180,00	98,34
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	70.000.000,00	82.195.500,00	82.195.500,00	100
<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	50.700.000,00	53.670.000,00	53.656.000,00	99,97
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	82.898.000,00	65.905.800,00	65.888.450,00	99,97
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	397.680.000,00	442.301.000,00	430.201.430,00	97,26
<i>Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD</i>	40.000.000,00	39.300.000,00	39.230.300,00	99,82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		126.598.600,00	126.454.000,00	99,89
<i>Pengadaan mebel</i>		41.394.000,00	41.394.000,00	100
<i>Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</i>		85.204.600,00	85.060.000,00	99,83
<i>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya</i>		0	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.463.319.962,00	3.294.730.962,00	3.254.848.555,00	98,79
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	8.000.000,00	3.459.000,00	3.256.000,00	93,16
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	200.000.000,00	166.000.000,00	152.923.155,00	92,12
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	3.255.319.962,00	3.125.235.962,00	3.098.669.400,00	99,15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.929.151.492,00	5.568.254.652,00	5.492.075.438,00	98,63
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	4.677.371.492,00	5.228.051.492,00	5.158.412.363,00	98,67
<i>Pemeliharaan mebel</i>	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100
<i>pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	50.000.000,00	70.000.000,00	69.983.000,00	99,98
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	198.680.000,00	267.103.160,00	260.580.075,00	97,56
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.152.500.000,00	1.103.540.000,00	1.101.983.955,00	99,86
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	152.500.000,00	226.540.000,00	225.916.455,00	99,72
<i>Penyusunan dan Pentapan RPPLH Kabupaten/ Kota</i>	-	75.680.000,00	75.172.100,00	99,33

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
<i>Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota</i>	152.500.000,00	150.860.000,00	150.744.355,00	99,92
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	877.000.000,00	876.067.500,00	99,89
<i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</i>	1.000.000.000,00	877.000.000,00	876.067.500,00	99,89
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN dan /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	784.833.000,00	494.329.000,00	488.455.270,00	98,83
Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	436.244.000,00	375.674.000,00	370.611.270,00	98,65
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	230.974.000,00	183.694.000,00	181.597.300,00	98,86
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	205.270.000,00	191.980.000,00	189.013.970,00	98,46
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	118.655.000,00	118.655.000,00	117.955.000,00	99,41
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi</i>	118.655.000,00	118.655.000,00	117.955.000,00	99,41

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	11.382.161.850,00	7.101.361.850,00	7.090.245.108,00	99,84
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	11.382.161.850,00	7.101.361.850,00	7.090.245.108,00	99,84
<i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	11.382.161.850,00	7.101.361.850,00	7.090.245.108,00	99,84
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)	141.646.570,00	72.347.000,00	72.122.000,00	99,69
Penyimpanan Sementara Limbah B3	32.567.000,00	32.567.000,00	32.419.000,00	99,55
<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</i>	21.348.000,00	21.348.000,00	21.260.000,00	99,59
<i>Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3</i>	11.219.000,00	11.219.000,00	11.159.000,00	99,47
Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	72.347.000,00	39.780.000,00	39.703.000,00	99,81

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</i>	2.280.000,00	2.280.000,00	2.275.000,00	99,78
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintahan Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan</i>	37.500.000,00	37.500.000,00	37.428.000,00	99,81
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	217.560.000,00	84.956.332,00	84.037.740,00	98,92
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	217.560.000,00	84.956.332,00	84.037.740,00	98,92
<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	39.780.000,00	33.638.332,00	33.598.600,00	99,88

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	51.318.000,00	51.318.000,00	50.439.140,00	98,29
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	281.000.000,00	178.657.000,00	173.769.825,00	97,26
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	281.000.000,00	178.657.000,00	173.769.825,00	97,26
<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	281.000.000,00	178.657.000,00	173.769.825,00	97,26
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	168.000.000,00	70.239.800,00	69.256.675,00	98,60
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168.000.000,00	70.239.800,00	69.256.675,00	98,60

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	168.000.000,00	70.239.800,00	69.256.675,00	98,60
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	48.800.000,00	48.800.000,00	48.730.000,00	99,86
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	48.800.000,00	48.800.000,00	48.730.000,00	99,86
<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>	48.800.000,00	48.800.000,00	48.730.000,00	99,86
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.541.950.000,00	14.486.656.750,00		
Pengelolaan Sampah	12.618.005.800,00	13.601.587.000,00	13.561.178.182,00	99,70
<i>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	9.557.433.800,00	9.535.744.800,00	9.527.971.214,00	99,92
<i>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan</i>	10.572.000,00	10.572.000,00	10.435.000,00	98,70

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	3.050.000.000,00	4.055.270.200,00	4.022.771.968,00	99,20
Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	719.820.000,00	644.995.000,00	492.433.500,00	76,35
<i>Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah</i>	719.820.000,00	644.995.000,00	492.433.500,00	76,35
JUMLAH	51.424.144.861,00	52.196.098.578,00	51.484.388.922,00	98,64

C. Pencapaian Lainnya

Pada tahun 2023 beberapa pencapaian yang di dapat Dinas Lingkungan Hidup dan binaan pada kegiatan-kegiatan. Adapun penghargaanannya antara lain:

1. Penghargaan Nirwasita Tantra dalam kategori Entitas Pemerintahan kategori Kota Sedang Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 dan Penghargaan Green Leadership untuk kategori DPRD Kota Sedang yang dituangkan melalui Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)
2. Sertifikat Adipura Tahun 2022 Kategori Kota Besar
3. Penghargaan Adiwiyata Mandiri Tahun 2023 dari Kementerian LHK
 - a. SDN Cemara 2 Surakarta
 - b. SMPN 8 Surakarta
4. Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2023 dari Kementerian LHK
 - a. SMPN 15 Surakarta
 - b. SDN Bratan 1 Surakarta
 - c. SDN Kleco 1 Surakarta
5. Penghargaan Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
 - a. SDN Serengan 2 Surakarta
 - b. SD Kanisius Serengan Surakarta
6. Penghargaan Lomba Program Kampung Iklim Tingkat Nasional
 - a. RW 16 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari
 - b. RW 16 Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon
 - c. RW 03 Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan
 - d. RW 05 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan
 - e. RW 09 Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres
7. Juara 1 Central Java's Investment Challenge 2023 dari Keris Jateng dengan judul proposal "Potensi Investasi Pengelolaan Limbah B3 Medis di Kota Surakarta"
8. TOP 40 KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan judul inovasi "Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui MAS DARLING (Masyarakat Sadar Lingkungan)"
9. Penghargaan kepada Yuyu Fatimah atas jasanya di bidang lingkungan hidup dalam rangka peringatan hari Kartini oleh Ibu Presiden dan Ibu Wakil Presiden

10. Peresmian PLTSa Surakarta melalui Sinergi Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Program Mendatangkan Sampah dari Luar Daerah (GEMAH LURAH) dengan SIBUSARI (Sistem Informasi Kebutuhan Sampah Monitoring Online



Gambar 3.19. Penerimaan Penghargaan Nirwasita Tantra dalam kategori Entitas Pemerintahan kategori Kota Sedang Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022



Gambar 3.20. Penerimaan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2023 dari Kementerian LHK

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian Tahun 2023

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis berdasarkan target Perubahan Renstra DLH Tahun 2021-2026 tercapai dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Indikator kinerja indeks kualitas air presentase capaian kinerja 94,70%, kategori **sangat baik**;
- 2) Indikator kinerja indeks kualitas udara presentase capaian kinerja 111,36% kategori **sangat baik**;
- 3) Indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan presentase capaian kinerja 130,57% kategori **sangat baik**;

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Secara umum faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja adalah motivasi tinggi karyawan DLH dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan, budaya organisasi yang baik dan sejuk, kepemimpinan yang kompeten, kedisiplinan karyawan DLH dalam pelaksanaan aturan dan kewajiban , lingkungan yang nyaman serta komitmen organisasi untuk tetap maju dan melayani Masyarakat dengan baik.

Fakor penghambatnya adalah reconfusing anggaran, hambatan – hambatan teknis di lapangan, keterbatasan SDM yang tidak mencakup pelaksanaan pekerjaan dan kelemahan pemyediaan data pendukung.

3. Total efisiensi anggaran tahun 2023

Total efisiensi anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 411.644.000.

B. Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan

1. Strategi yang digunakan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemantauan kualitas air dan udara serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- 2) Meningkatkan pembangunan IPAL komunal untuk industri dan pemeliharaan rutin untuk IPAL yang telah terbangun;
- 3) Pemanfaatan aset Pemerintah kota yang terbengkalai untuk dialihfungsikan menjadi RTH;
- 4) Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau agar berfungsi secara optimal;
- 5) Meningkatkan pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pengangkutan sampah dan pengurangan sampah (4R) oleh Bank Sampah;
- 6) Meningkatkan pengelolaan limbah B3 melalui optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap penghasil limbah B3;
- 7) Mendorong terciptanya kampung Proklim di setiap kelurahan;
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dan kapasitas Sumber Daya Manusia dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis serta menjalin jejaring Kerjasama antar instansi lingkungan hidup yang lain;
- 9) Peningkatan pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan persetujuan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan;
- 10) Penegakan regulasi untuk penyediaan RTH di lahan privat dengan kewajiban mencantumkan penyediaan RTH dalam dokumen lingkungan (UKL - UPL/AMDAL);
- 11) Menggandeng pihak ketiga untuk melaksanakan CSR penanaman pohon pada lahan tertentu atau pemberian bibit tanaman.

2. Program/kegiatan/subkegiatan dan aktivitas prioritas tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran
1.	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan		
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Pengujian Kualitas Air Sungai dan Air Limbah	Rp.40.000.000,00
		Pengujian Kualitas Udara	Rp.57.000.000,00

	Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Rp.60.000.000,00
		Pemeliharaan IPAL	Rp.5000.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sosialisasi Program Kampung Iklim	Rp.60.256.120,00
2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan RTH	Rp.12.339.906.000,00